

**DAFTAR BACAAN****Buku**

Ali, Achmad, *Sekelumit Tinjauan tentang Hubungan antara Azaz Audi Et Alteram Partem dengan Azaz-Azaz Lainnya dalam Hukum Acara Perdata, Hukum dan Pembangunan.*

Asfinawati, *Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka Judicial Review di Mahkamah Agung, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013.*

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.*

\_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.*

Basuki, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Meditama, Yogyakarta, 2010.*

Darimurti, Krishna D., *Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.*

Faiz, Pan Mohamad, *Perubahan Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemerintah dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi (Membaca Momentum 20 Tahun Reformasi Indonesia), CV. Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018.*

Hadjon, Philipus M., dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.*

- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta Pusat, 2017.
- Arnscheidt, J., *Law Making for Development: Exploration into the Theory and Practice of International Legislative Projects*, Leiden University Press, Leiden, 2008.
- Kementerian Dalam Negeri, *Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Direvisi*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2016.
- Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 17, Kencana, Jakarta, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Natabaya, H.A.S., *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

Syahuri, Taufiqurrahman, *Pengkajian Konstitusi tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2014.

Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia I*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017.

Utomo, Nurrahman Aji dan Ekawestri Prajwalita Widiati, *Menjejakkan Legislasi Berbasis HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2016.

### **Disertasi**

Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

### **Jurnal**

Asrun, A. Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 4, No. 6, Juni 2016.

Effendi, Maftuh dan Tri Cahya Indra Permana, *Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1, Juni 2018.

Minolah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi di Indonesia*, Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII, No. 1, Maret 2011.

- Nasution, Bahder Johan, *Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum, Demokrasi*, Vol. VI, No. 1, 2007.
- Nurdianto, Fajar, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS, Vol. 11, No. 1, Januari-Juni, 2015.
- Qomar, Nurul, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2019.
- Setiadi, Wicipto, *Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha*, Jurnal Rechtvinding, Vol. 7, No. 3, Desember 2018.
- Soeroso, Fajar Laksono, *Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 3, September 2012.

### **Workshop, Rapat, dan Kajian**

- DAPP-Bappenas, *Pemetaan Hasil Identifikasi terhadap UU Sektor yang Berpotensi Bermasalah, Workshop Koordinasi Strategis Analisa Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, 5 Desember 2015.
- Kepala Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, APEC-Workshop Penyusunan Pedoman Konsultasi Publik Peraturan Perundang-Undangan, Kemenko Perekonomian dan Kemenkumham, Denpasar, 27-28 November 2014.
- Menteri Hukum dan HAM, *Rapat Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2017 di Lingkungan Pemerintah*,

Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2017, dan Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2017, Jakarta, 11 Januari 2016.

Nurbaningsih, Enny, *Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia*, Pidato dalam Diskusi “Rule of Law in Indonesia”, World Justice Project, Jakarta, 19 Januari 2019.

Soebroto, Arif Christiono, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas*, Workshop Peraturan Kebijakan, Kementerian PPN Bappenas, Jakarta.

Soeprijanto, Totok, *Sepintas Kajian Tata Urutan Perundang-Undangan Dan Pendelegasian Wewenang Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2014.

### **Internet**

Andryan, “Judicial Review Non Litigasi dalam Perspektif Negara Hukum”,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af913aaf2a54/ijudicial-review-i-non-litigasi-dalam-perspektif-negara-hukum-oleh--andryan>,

dikunjungi pada 20 Mei 2019.

<http://peraturan.go.id/pp.html>, dikunjungi pada 11 Februari 2018.

<http://sipuu.setkab.go.id/>, dikunjungi pada 23 Januari 2019.

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=5>, dikunjungi pada 23 Januari 2019.

Hukum Online, “MA Diminta Cabut Permenkumham Sengketa Konflik Norma”,

<http://hukumonline.com>, dikunjungi pada 2 Mei 2019.

Humas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, “Sidang Pemeriksaan

Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan (PUU) Melalui Jalur

Non Litigasi Terkait Korban Salah Tangkap”,

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, dikunjungi pada 25 Januari 2019.

Riewanto, Agus, “Progresivitas Penyelesaian Konflik Perundangan”,

*m.mediaindonesia.com*, 16 Januari 2019, dikunjungi pada tanggal 25 Januari

2019.